

## PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK RI-ISRAEL DAN PEREBUTAN PENGARUH GLOBAL

Poltak Partogi Nainggolan

### Abstrak

*Tanpa diantisipasi sebelumnya, setelah berlangsungnya pembukaan hubungan diplomatik Negara Teluk dengan Israel, wacana pembukaan hubungan diplomatik Israel dengan Republik Indonesia (RI) mengemuka. Selain oleh PM Netanyahu sendiri, isu pembukaan hubungan diplomatik dimainkan pelobi pendukung utama Israel, Amerika Serikat (AS), untuk menetes situasi apakah respons Pemerintah RI sudah benar-benar berubah. Negara besar dan menengah kemudian juga berusaha memengaruhi sikap Pemerintah RI atas kemerdekaan Palestina terkait kepentingan mereka masing-masing di kawasan dan tingkat global. Reaksi masyarakat Indonesia yang masih amat sensitif untuk mengakui eksistensi dan melakukan kerja sama dengan negara zionis itu, mendorong Pemerintah RI untuk menegaskan penolakan pembukaan hubungan diplomatik, seperti sikap sebelumnya. Jika tidak, tekanan politik yang besar dari dalam negeri akan muncul. Konstitusi dan penghormatan pada resolusi-resolusi PBB tetap menjadi kunci resolusi konflik Palestina bagi Indonesia, yang anti-penjajahan dan terus memperjuangkan perdamaian dunia.*

### Pendahuluan

Perkembangan situasi politik di Timur Tengah tanpa terhindarkan membawa pengaruh besar pula terhadap Indonesia. Pembukaan hubungan diplomatik empat negara di kawasan Arab, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan dan Maroko dengan Israel yang menandai perkembangan baru di kawasan itu, belakangan ramai dibicarakan di tanah air (Kompas.com, 26 Desember 2020).

Ini disebabkan selain karena sejak semula tidak jelas siapa pengusulnya, juga karena isu ini sensitif dan akan besar implikasinya terhadap masa depan Palestina dan prospek stabilitas keamanan, baik di tingkat domestik, Kawasan, maupun global.

Isu pembukaan hubungan diplomatik Israel-Indonesia menyita perhatian karena menyangkut solusi atas masalah Palestina yang sejak dekolonisasi di akhir tahun 1940-



an dibiarkan terkatung-katung, sedangkan reaksi masyarakat Indonesia begitu resisten. Perkembangan Timur Tengah sendiri tidak dapat dilepaskan dari perhatian dan kepentingan negara dan rakyat Indonesia, melibatkan pandangan emosional mereka yang sulit dieliminasi mengingat hubungan historis yang sudah terbentuk. Sehingga, perkembangan sekecil apapun di kawasan itu akan dicermati oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, karena akan memberi dampak yang signifikan bagi hubungan RI dengan negara-negara yang berkonflik, khususnya Palestina dan Israel.

Sementara, negara-negara besar, baik yang berkepentingan langsung maupun tidak dengan prospek Timur Tengah yang stabil, berusaha memengaruhi bagaimana dan ke arah mana kemerdekaan Palestina harus diselesaikan. AS, yang semakin dikontrol lobi Yahudi yang berusaha mengintroduksi kebijakan baru di kawasan, berusaha mengaitkannya dengan tawaran investasi kepada Indonesia bagi pembangunan infrastruktur, termasuk pertahanan. China bergeming dengan terus mendukung solusi PBB yang melindungi Palestina, agar dapat berdiri sebagai sebuah negara terbebas dari imperialisme dan kolonialisme Israel. Pendekatan yang berbeda dengan AS, juga terkait dengan strategi China dalam menyelesaikan konflik di Laut China Selatan (LCS) secara bilateral, yang membutuhkan dukungan dari negara-negara yang tidak maupun memiliki klaim teritorial di LCS. Negara Kekuatan Menengah, seperti Iran dan Turki, secara konsisten

menentang kehadiran negara zionis dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Tulisan ini membahas sikap Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, dan hubungannya dengan kebijakan unilateral Israel dan negara lain, yang memiliki kepentingan atas prospek kawasan lainnya, termasuk Asia Tenggara. Pembahasan mengungkap asal mula inisiatif pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, mengapa Indonesia menjadi target, serta dampaknya bagi AS, China dan kekuatan menengah. Di bagian akhir, dibahas bagaimana Indonesia harus menyikapinya.

### **Inisiatif Pembukaan Hubungan Diplomatik**

Sejak didirikan secara sah pada 18 Agustus 1945, sikap RI dalam dekolonisasi Palestina, adalah jelas dan tidak berubah, yakni mematuhi konstitusi, yaitu UUD 1945, dan ketentuan hukum internasional, yang telah diputuskan PBB. Berpijak pada konstitusi, dalam menjalankan politik luar negerinya, RI terus berupaya secara konsisten mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan pada keadilan sosial dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Juga, sebagai bagian dari masyarakat dunia, RI selalu menghormati dan menjalankan resolusi-resolusi PBB yang melakukan misi perdamaian dunia. Hal ini telah dijalankan RI sejak dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum No. 181/1947 tentang pembentukan 2 negara, yakni Palestina dan Israel, sebagai upaya dekolonisasi, dan melindungi status internasional Jerusalem. Resolusi

PBB No. 242/1967 dan seterusnya, tetap mengakui terwujudnya dua negara yang hidup berdampingan secara damai dan melindungi status internasional Jerusalem, dengan kondisi sebelum ekspansi Israel tahun 1967.

Pemberitaan tiga media Israel, termasuk *The Times of Israel*, yang mengungkap 'sikap baru' RI pasca-tujuh dasawarsa lebih, adalah hal yang mengejutkan, sekaligus persoalan serius. Demikian halnya dengan penjelasan sepihak CEO US *International Development Finance Corporation* (DFC), Adam Boehler, pelobi yang dekat dengan Jared Kushner, menantu Presiden Donald Trump, yang amat berpengaruh dalam menentukan perubahan kebijakan AS di Timur Tengah terkait Israel. Kepada Bloomberg di Jerusalem, Boehler telah mengiming-imingi RI dengan bantuan sampai US\$2 milyar atau Rp28 triliun, jika negara demokrasi dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ini bersedia membuka hubungan diplomatiknya dengan Israel (Kompas.com, 28 Desember 2020). Secara formal, negara yang sejak tahun 1948 berdiri, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan RI, kecuali relasi yang sangat terbatas di bidang ekonomi, pariwisata, dan keamanan.

Iming-iming di atas ditambahkan dengan tawaran AS dalam pengadaan pesawat tempur tercanggih, F-35, untuk meningkatkan modernisasi alutsista RI. Buat Netanyahu, sukses ini berguna untuk menghadapi pemilu akhir Januari 2021. Sedang bagi RI, hal ini berguna untuk merespons perkembangan lingkungan strategis di LCS, dengan meningkatnya

ancaman keamanan yang dihadapi, termasuk oleh tetangganya seperti Malaysia, Filipina, Australia dan Singapura, yang telah memiliki hubungan diplomatik setingkat Duta Besar dengan Israel. Pelontaran gagasan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel bukan yang pertama kali dihadapi RI.

Di tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid pernah melontarkan gagasan yang progresif ini, dengan alasan rasional, negara-negara Arab di sekitarnya, seperti Jordania dan Mesir, telah melakukannya. Juga, Israel bukanlah negara yang tidak mengakui Tuhan, yang harus dimusuhi, sementara dengan negara komunis, seperti China, RI telah membuka hubungan diplomatik sejak lama. Tokoh-tokoh penting pun pernah dilobi secara sepihak oleh Israel, termasuk anggota DPR dan Ketua Komisi Luar Negeri dari Fraksi Golkar, seperti Yudi Chrisnandi dan Tantowi Yahya, dengan undangan ke Israel, walaupun hubungan diplomatik belum dibuka. Selama ini Israel menjalankan *back door policy*-nya demi memengaruhi para penentu kebijakan strategis serta para tokoh yang berpengaruh dari ormas Islam di tanah air. Peran pemimpin Sunni dari Arab Saudi, seperti Pangeran Salman bin Saud, dan Negara Teluk yang ingin mendorong modernisasi sekaligus moderatisme Islam, yang kian khawatir atas meningkatnya dominasi dan ancaman kekuatan Syiah di Iran, Suriah dan Lebanon, serta konservatisme dan radikalisme Islam di kawasan, membuka jalan bagi keinginan

dan langkah gencar Israel dan para pelobi Yahudi di AS dan negara lain dalam mendorong normalisasi hubungan.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berulang kali menjelaskan bahwa RI hingga saat ini tidak berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebaliknya, RI tetap memberi dukungan besar pada perjuangan kemerdekaan Palestina (Kompas.com, 16 Desember 2020). Ditegaskan, kontak dengan Israel untuk pembukaan hubungan pun belum pernah dilakukan Pemerintah Indonesia.

### Dampak Negatif bagi Indonesia

Pandangan yang mendukung dari para pelobi Israel sering menganggap enteng dan keliru eksistensi kelompok konservatif, yang dianggap cuma minoritas, dan hanya ramai di media sosial, yang tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Mereka terlalu percaya diri, namun tampak gegabah dalam menilai reaksi yang terjadi atas upaya *testing the water* Israel terhadap kebijakan luar negeri di era Presiden Joko Widodo ini. Mereka abai terhadap munculnya reaksi penentangan dari dalam negeri, seperti yang diperlihatkan Majelis Ulama Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera, yang menjadikan isu Palestina sebagai salah satu program kerja dan kampanye mereka. Sehingga, jika perubahan kebijakan atas Palestina dilakukan begitu saja, tekanan politik domestik akan meningkat dari kubu *Islamist* terhadap pemerintahan 'nasionalis-religius' Joko Widodo. Situasi ini dapat mendukung eksistensi

kelompok konservatif dalam kampanye khilafah yang anti-pluralisme di pemilu 2024.

Jadi, jika RI merespons positif keinginan Israel, tanpa pikir panjang dan cermat, lobi Timur Tengah di tanah air dan Asia Tenggara secara lebih luas akan memanas, akibat persaingan kuat yang muncul. Iran versus Turki dan Arab Saudi, yang masing-masing merepresentasikan kekuatan Syiah dan Sunni yang amat berpengaruh di Timur Tengah, akan segera menjalankan ofensif diplomatik ke RI dan kawasan. Presiden Turki Erdogan pun bisa mempercepat kunjungannya ke RI, yang diungkapkan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Malaysia pada tahun 2019. Erdogan berkepentingan menjaga RI konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Di Asia Tenggara, langkah agresif pendukung Trump mendorong negara-negara Asia Tenggara membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dan melupakan nasib Palestina, akan memengaruhi posisi China terkait LCS. Dengan memperkuat kapasitas pertahanan RI, melalui pengadaan F-35 dan alutsista lainnya, *balance of power* dapat diciptakan AS, dengan pengurangan dominasi dan kemampuan kontrol militer China di LCS. Sehingga, China akan dipaksa untuk melakukan de-eskalasi ketegangan. Namun, jika RI mengikuti keinginan AS, China akan bersikap keras terhadap RI dalam merespons konflik LCS. Pemimpinnya akan mempersulit realisasi pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, yang menjadi target Presiden Joko Widodo dan Menko Investasinya.

Tanggung jawab internasional AS juga harus kembali ditunjukkan dengan turut membantu terciptanya keseimbangan di Asia Tenggara.

### Penutup

Bagaimana seharusnya RI menyikapi inisiatif PM Israel, Netanyahu, yang gencar mendekati negara-negara berpengaruh, demi pembukaan hubungan diplomatik? RI tidak perlu mengikuti keinginan itu, sebab Netanyahu sendiri tengah menghadapi penentang yang kian meluas di Israel akibat perilaku korupnya. Ia berpikir, dengan suksesnya menjalankan 'kebijakan pintu belakang' ini, akan dapat mengurangi tekanan politik domestik terkait kasus korupsinya selama ini. Sedangkan dunia internasional tidak sama responsnya, seperti tampak dalam sikap Kanselir Merkel dari Jerman, dan juga sikap China sebagai salah satu negara pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Kemenangan Joe Biden diharapkan dapat mengoreksi kebijakan AS yang keliru di bawah Trump. Presiden Biden harus kembali mendukung kemerdekaan Palestina dengan batas teritorial sebelum invasi Israel 1967, dan mendorong kembali solusi dua negara yang berdampingan secara damai. AS harus menentang perluasan pemukiman Israel dan pendudukan wilayah Palestina. Langkah Presiden Biden mengoreksi kebijakan Trump sudah terlihat ketika Duta Besar Sementara AS untuk PBB, Richard Mills, pada 26 Januari 2021 di New York mengumumkan bahwa AS akan segera memulihkan hubungan

dengan Palestina dan akan kembali mengaktifkan bantuan bagi pengungsi Palestina (Kompas.tv, 27 Januari 2021). Langkah ini adalah kebalikan dari tindakan pemerintahan AS di bawah Trump, serta kini menjadi posisi dasar pemerintahan AS di bawah Joe Biden yang mendukung solusi dua negara untuk mengakhiri konflik politik antara Israel dan Palestina.

Respons Ketua DPR, Puan Maharani, sudah tepat. Penjelasan di media massa pada 18 Desember 2020 merepresentasikan pendapat mayoritas rakyat Indonesia atas isu pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel *vis a vis* tuntutan kemerdekaan Palestina, yang masih harus diperjuangkan secara optimal. Israel sendiri harus mematuhi seluruh resolusi PBB tentang Palestina, sebagai solusi final yang adil. Sebagai konsekuensinya, RI harus konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, yang harus terus berjuang mengeliminasi penjajahan dan menciptakan perdamaian dunia, sesuai konstitusi.

### Referensi

- "Amerika Serikat Ubah Kebijakan Tentang Palestina", *Kompas.tv.*, 27 Januari 2021, diakses 27 Januari 2021.
- "Dijanjikan Bantuan 28 Trilyun oleh AS, Indonesia Tetap Tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel," *Kompas.com.*, 24 Desember 2020, diakses 4 Januari 2021.
- Lanti, Irman G. 2021. "Should Indonesia Open Diplomatic Relations with Israel," *The Jakarta Post-online*, 28 Desember 2020, diakses 4 Januari 2021.

"Menlu: Indonesia Tidak Berniat Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel," *Kompas.com*, 16 Desember 2020, diakses 4 Januari 2021.

"MUI Dorong Pemerintah Tetap Tegas Tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel," *Kompas.com*, 24 Desember 2020, diakses 4 Januari 2021.

Satria, Lintar. 2021. "Trump Nyaris Dorong Normalisasi RI-Israel," *Republika*, 22 Januari 2021, hal. 4.

"Setelah Maroko, AS Lobi Negara Muslim di Asia Buat Berdamai dengan Israel," *Kompas.com*, 26 Desember 2020, diakses 4 Januari 2021.



Poltak Partogi Nainggolan  
partogi.nainggolan@dpr.go.id

---

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia pada tahun 1986, pendidikan S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) pada tahun 1999, dan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert Ludwigs - Universitaet Freiburg (Deutschland) pada 2011 dengan *judicium magna cumlaude*. Beliau adalah seorang Profesor Riset bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Indonesia dan Rivalitas China, Jepang, dan India" (2018)" dan "Proxy War di Timur Tengah" (2019).

---

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.